



**LAPORAN BADAN LEGISLASI
ATAS
EVALUASI PROGRAM LEGISLASI NASIONAL DAN PENYUSUNAN
PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2024
DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Tanggal 3 Oktober 2023

=====
**Disampaikan oleh: Drs. M. Nurdin, M.M.
Wakil Ketua Badan Legislasi, A-175**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;

**Yth. Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia/ yang mewakili;
Dan Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat waláfiat.

Selanjutnya perkenankan saya selaku Pimpinan Badan Legislasi atas nama Badan Legislasi menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Program Legislasi Nasional dan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Legislasi bersama Menteri Hukum dan HAM dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI.

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang menyebutkan “*evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas Tahunan dapat dilakukan sewaktu-waktu*” dan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyatakan “*Hasil pembahasan Prolegnas antara Badan Legislasi, alat kelengkapan DPD, serta Menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan perundang-undangan disepakati menjadi Prolegnas dan selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan*”.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami melaporkan hasil evaluasi Prolegnas dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi dalam rapat kerja bersama Kementerian Hukum dan HAM RI dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, sebagai berikut:

1. bahwa dengan telah diundangkannya beberapa rancangan undang-undang di tahun 2023 dan penarikan usulan dari pengusul maka 6 (enam) RUU dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas Tahun 2023 yaitu:
 - a. RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (*omnibus law*);
 - b. RUU tentang Kesehatan (*omnibus law*);
 - c. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen;
 - d. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - e. RUU tentang Bahan Kimia; dan
 - f. RUU tentang Kefarmasian.serta memasukkan 1 (satu) RUU usulan baru ke dalam Prolegnas Perubahan Kedua RUU Prioritas Tahun 2023 yaitu RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (Dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tercantum RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia).

2. Dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 Badan Legislasi telah menerima usulan RUU sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) RUU, dimana 10 (sepuluh) RUU merupakan usulan RUU baru untuk dipertimbangkan masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2024 yaitu:
 - a. RUU tentang Pertanahan/DPR (Komisi II);
 - b. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran/DPR (Komisi V);
 - c. RUU tentang Pertekstilan/DPR (Badan Legislasi);
 - d. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim/DPR (Badan Legislasi);
 - e. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji/DPR (Badan Legislasi);
 - f. RUU tentang Komoditas Strategis/DPR (Badan Legislasi);
 - g. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat/ DPR (Badan Legislasi);
 - h. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik/DPR (Badan Legislasi)/DPD;
 - i. RUU tentang Persandian/Pemerintah; dan
 - j. RUU tentang Hukum Perdata Internasional/Pemerintah.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan memperhatikan rasionalitas penetapan jumlah RUU dalam Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2023, jumlah RUU dalam daftar tunggu, jumlah RUU yang diusulkan, serta berbagai saran dan masukan, Rapat Kerja Badan Legislasi bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI menyetujui untuk menyepakati:
 - Jumlah Prolegnas RUU Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) RUU beserta 5 daftar RUU kumulatif terbuka;
 - Jumlah Prolegnas RUU Perubahan Keenam Tahun 2020-2024 sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) RUU beserta 5 daftar RUU kumulatif terbuka; dan
 - Jumlah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) RUU beserta 5 daftar RUU kumulatif terbuka.

(Adapun daftar RUU terlampir dalam laporan)

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Demikianlah Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Program Legislasi Nasional dan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 untuk selanjutnya Badan Legislasi menyerahkan kepada Rapat Paripurna yang terhormat ini untuk menetapkan sesuai dengan mekanisme penyusunan Prolegnas.

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkanlah kami menyampaikan terima kasih kepada semua Anggota Badan Legislasi, Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, dan Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan evaluasi Program Legislasi Nasional Tahun 2023 dan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 ini dalam suasana yang penuh demokratis. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada kegiatan Badan Legislasi, baik dari Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Fraksi, Staf Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Tim Ahli/Pendukung yang telah memberikan dukungan secara maksimal.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 3 Oktober 2023
PIMPINAN BADAN LEGISLASI
WAKIL KETUA,

ttd

DRS. M. NURDIN, M.M.
A-175